



International e.V.

Annual Narrative Report

January – December 2019

**(Protection of Women Migrant Workers against
TIP and GBV in Lombok Timur)**

(Reported by ADBMI Foundation)



Ringkasan Dokumen

Dokumen ini merupakan laporan perkembangan proyek ADBMI pada tahun 2019–2020 yang berfokus pada implementasi UU No. 18 Tahun 2017, penguatan perlindungan pekerja migran, serta keberlanjutan organisasi LSD di tingkat desa.

1. Perkembangan Kebijakan Nasional

- Hingga Januari 2020, implementasi UU No. 18 Tahun 2017 masih belum optimal karena sebagian besar peraturan turunannya belum diterbitkan. Dari 17 aturan yang seharusnya selesai, baru 8 yang telah disahkan.
- Pemerintah mulai menerapkan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK/One Channel Placement System) untuk penempatan PMI ke Arab Saudi melalui perusahaan yang telah ditunjuk. Sistem ini masih bersifat uji coba (pilot project) dan hanya melibatkan 53 P3MI.
- Di sisi lain, Kementerian PPPA menerbitkan kebijakan pembentukan UPTD PPA, yang menggantikan fungsi P2TP2A dan diharapkan memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk pekerja migran.

2. Perkembangan Politik dan Kondisi Daerah

- Lombok Timur menjadi kabupaten pengirim PMI terbesar kedua di Indonesia berdasarkan data BNP2TKI.
- Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menunjukkan komitmen untuk merevisi Perda perlindungan PMI serta meningkatkan kolaborasi dengan Disnakertrans dalam kampanye migrasi aman dan penyelesaian kasus PMI.

3. Perkembangan Program di Desa

Program menunjukkan perkembangan signifikan:

- Keberadaan LSD telah diakui oleh pemerintah desa.
- Lima desa program menyediakan ruang khusus bagi LSD di kantor desa.
- Pemerintah desa mulai berkomitmen mengalokasikan dana operasional bagi LSD.
- LSD dilibatkan dalam Musrenbangdes sehingga isu pekerja migran mulai masuk dalam perencanaan pembangunan desa.
- Popularitas LSD meningkat sehingga masyarakat lebih mudah melaporkan kasus maupun memperoleh informasi migrasi aman.

4. Tantangan Program

Beberapa kendala yang dihadapi:

- Lambatnya pemerintah menyesuaikan kebijakan turunan UU.
- Aparatur pemerintah masih cenderung berhati-hati sehingga inovasi berjalan lambat.
- Pergantian pejabat pasca pemilu menyebabkan proses advokasi harus dimulai kembali dengan pejabat baru.

5. Perubahan Pelaksanaan Program

Selama periode laporan:

- Sebanyak 500 keluarga PMI menerima penyuluhan migrasi aman meskipun tidak dianggarkan secara khusus.
- Ditambahkan kegiatan konsultasi penyusunan Peraturan Bupati mengenai pembentukan UPTD PPA.
- Penanganan kasus tetap berjalan melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR).

6. Kerja Sama dan Advokasi

ADBMI memperluas kolaborasi dengan:

- Media lokal untuk mengangkat isu pekerja migran dan perdagangan orang.
- Organisasi masyarakat dan NGO di tingkat desa maupun kabupaten untuk memperluas kampanye migrasi aman.

7. Pendekatan Keberlanjutan

Program menekankan:

- Penguatan kelembagaan LSD melalui ruang sekretariat di kantor desa dan pendanaan internal.
- Pengurangan kemiskinan melalui migrasi aman dan pencegahan praktik calo.
- Kesetaraan gender dengan mendorong kepemimpinan perempuan di LSD.
- Keterlibatan pemuda sebagai agen perubahan.
- Pemanfaatan budaya lokal Rudat sebagai media edukasi masyarakat.

8. Kontribusi terhadap Strategi Nasional dan SDGs

Program berkontribusi pada:

- Penguatan kebijakan perlindungan PMI melalui Perdes, pembentukan UPTD PPA, dan revisi regulasi daerah.

- Empat tujuan Sustainable Development Goals (SDGs):
 - SDG 4: Pendidikan Berkualitas.
 - SDG 5: Kesenjangan Gender.
 - SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
 - SDG 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

9. Dukungan Pemerintah dan Masyarakat

- Disnakertrans aktif memediasi penyelesaian kasus PMI; 17 dari 19 kasus yang dilaporkan berhasil diselesaikan melalui mediasi.
- Pemerintah desa dan masyarakat memberikan dukungan nyata terhadap kegiatan proyek.
- Anggota LSD secara sukarela melakukan penyuluhan migrasi aman dari rumah ke rumah serta mendampingi kasus-kasus pekerja migran.

Kesimpulan

Laporan ini menunjukkan bahwa fokus ADBMI telah berkembang dari pembentukan kelembagaan menuju penguatan keberlanjutan dan pengaruh kebijakan. Keberadaan LSD semakin diterima oleh pemerintah desa, dukungan pemerintah daerah meningkat melalui Disnakertrans dan rencana pembentukan UPTD PPA, serta advokasi mulai menghasilkan perubahan nyata dalam tata kelola perlindungan pekerja migran. Meski demikian, tantangan utama masih berasal dari lambatnya implementasi regulasi nasional dan dinamika birokrasi di tingkat daerah.